PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN PRODUKTIF DI SMK NEGERI 3 MAKASSAR

Muhammad Ridho Illahi
Universitas Negeri Padang
Indonesia

Email: ridho.illahi.mr@gmail.com

Abstract : The objectives of the research are to discover planning, procurement, inventory, utilizing, and deletion of productive learning facilities and infrastructure in SMK Negeri 3 Makassar. The research employed descriptive qualitative approach with the data resources namely the principal, vice principal of facility and infrastructure, vice principal of curriculum, the head of study program, the head of workshop, and the head of sub-administrative division who were chosen by using purposive sampling and snowball sampling techniques. The data were collected through observation, interview, and documentation. The data were analyzed by using data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The data validity of the research was checked by using credibility test (degree of trust) with observational persistence technique and triangulation method.

The result of the research reveal that the management of productive learning facilities and infrastructures conducted in SMK Negeri 3 Makassar is fairly good. It can be seen from: (1) the planning of productive learning facilities and infrastructures which was conducted in SMK Negeri 3 Makassar was through activities, namely needs analysis, priority scale determination, budgeting and proposal preparation, (2) the procurement of productive learning facilities and infrastructures in SMK Negeri 3 Makassar was conducted firstly by disbursing the budget according to activity plan and school budget (RKAS), then conducted procurement by buying equipments directly to the shop of factory by using school operational fund (BOS). Besides, the help of the procurement of productive learning facilities and infrastructures was also coming from local government, (3) the procedure of the inventory of productive learning

facilities and infrastructures in SMK Negeri 3 Makassar was conducted through note-taking, giving code, and reporting quarterly and annually, (4) productive learning facilities and infrastructures in SMK Negeri 3 Makassar was used according which was effective and efficient, so in operating the equipment, it used guidance in a form of guidance book and followed instructions from productive subject teachers, (5) the deletion of productive learning facilities and infrastructures in SMK Negeri 3 Makassar was conducted on productive facilities and infrastructures which could not be used anymore/broken by destroying them.

Key words: Management of facilities and infrastructure, productive learning

A. Pendahuluan

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai pendidikan menengah kejuruan merupakan salah satu subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang memainkan peranan yang sangat strategis bagi terwujudnya tenaga kerja terampil nasional. Hal ini sesuai dengan tujuan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor

32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat 3, yaitu meningkatkan kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Sekolah Menengah Kejuruan memiliki peran yang sangat strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia. Menurut Zamtinah (2000) dalam Sayuti & Kurniawati (2013) Guna menghadapi tantangan di era globalisasi, maka minimal kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah penguasaan teori, kemampuan praktik, sikap kerja, kompetensi personal dan kompetensi sosial.

Dari pengertian tersebut ditegaskan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melatih keterampilan-keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuan peserta didik, sehingga setelah lulus bisa langsung masuk ke dunia industri. Meskipun tidak semua bisa langsung bekerja, mereka masih bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi.

Pendidikan yang berkualitas terdapat pada sekolah yang berkualitas dan salah satu ciri dari sekolah yang berkualitas tersebut mempunyai kelengkapan fasilitas yang menunjang proses pembelajaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan. Bila suatu sekolah kurang memperhatikan fasilitas yang ada di sekolahnya, maka peserta didiknya akan merasa kurang bersemangat dalam proses pembelajaran. Untuk lembaga pendidikan, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus memenuhi berbagai sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses pembelajaran.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan sekolah yang di dalam proses pembelajarannya lebih banyak praktik daripada teori, maka secara tidak langsung di dalam proses pembelajarannya membutuhkan sarana dan prasarana pembelajaran yang wajib dipenuhi. Pemenuhan sarana dan prasarana pembelajarannya pun tidak serta merta dipenuhi begitu saja, akan tetapi harus memperhatikan bagaimana standar sarana dan prasarananya, yang secara umum juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 yang berbunyi bahwa “satu SMK/MAK memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani

minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 48 rombongan belajar.

Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk mencapai tujuan pendidikan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien (Suryosubroto, 2009:305). Sedangkan menurut Fauzan (2016), prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, yang meliputi bangunan sekolah, lapangan olahraga, dan halaman sekolah. Dalam hal ini, prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran produktif adalah bangunan sekolah yang berupa ruang kelas dan ruang praktik. Tidak hanya sebatas mengetahui aturan tentang standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar yang berkaitan dengan pengelolaannya pun harus diperhatikan. Standar pengelolaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa standar pengelolaan itu terdiri dari tiga bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Setiap sarana dan prasarana pembelajaran yang ada di dalam sebuah sekolah perlu

dikelola dengan sebaik-baiknya secara bertahap dan berkelanjutan agar dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena berfungsi atau tidaknya sarana dan prasarana pembelajaran tersebut akan sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran yang ada di sebuah sekolah juga akan efektif dan efisien apabila dapat didukung oleh sumberdaya manusia yang professional. Sebaliknya, apabila sumber daya manusia yang ada tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran tersebut juga akan kurang optimal. Harus ada keseimbangan antara komponen-komponen di dalam pengelolaan yang benar-benar mengerti dan memahami prinsip-prinsip dalam pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran untuk dapat mencapai tujuan dari pendidikan nasional. Pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran produktif itu sendiri meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, dan penghapusan (Farikhah, 2015). Unsur-unsur dalam pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran juga harus

bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya agar hasilnya pun dapat tercapai.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa SMK Negeri 3 Makassar merupakan salah satu sekolah kejuruan yang ada di Kota Makassar yang memiliki 6 (enam) program studi, yaitu teknik bangunan, teknik listrik, teknik mesin, teknik otomotif, teknik komputer dan informatika, serta teknik energi terbarukan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sistem pendidikan kejuruan ini memiliki standar kompetensi dengan tujuan untuk menjamin bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ini benar-benar memberikan kompetensi yang telah dibutuhkan oleh dunia industri. Oleh karenanya, ukuran mutu lulusan sekolah kejuruan ini tidak hanya dilihat dari hasil Ujian Nasional, tetapi juga dari kompetensi yang dicapai sesuai dengan program studi masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan (SMK) dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu kelompok normative, kelompok adaptif, dan kelompok produktif. Dari pengelompokan tersebut, dapat dipahami bahwa kelompok produktif merupakan mata pelajaran yang dijadikan sebagai bekal

keterampilan bagi peserta didiknya untuk dapat memasuki dunia industri. Oleh karena itu, untuk dapat mendukung penguasaan keterampilan peserta didik dalam pembelajaran produktif dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai serta pengelolaan yang baik terhadap sarana dan prasarana yang digunakan pada pembelajaran produktif.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan, diketahui bahwa pengelolaan terhadap sarana dan prasarana pembelajaran produktif di SMK Negeri 3 Makassar dimulai dari tahap perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, sampai pada tahap penghapusan. Perencanaan sarana dan prasarana pembelajaran produktif yang dilakukan di SMK Negeri 3 Makassar mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). Sementara itu, pengadaannya berdasarkan hasil perencanaan dengan melakukan pembelian langsung menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan juga menerima bantuan berupa peralatan pembelajaran dari pemerintah.

Selanjutnya, untuk mempermudah dalam mengenali seluruh peralatan yang digunakan dalam pembelajaran produktif yang ada di SMK Negeri 3 Makassar, maka dilakukan pencatatan terhadap sarana pembelajaran produktif yang dimiliki oleh masing-masing program studi. Adapun sarana dan prasarana pembelajaran produktif yang tersedia di SMK Negeri 3 Makassar digunakan oleh masing-masing program studi pada saat pelajaran produktif sesuai dengan instruksi oleh guru yang bersangkutan. Kemudian, untuk sarana pembelajaran produktif yang sudah tidak layak pakai dilakukan penghapusan dalam daftar inventarisasi dengan cara dimusnahkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur penghapusan yang telah ditetapkan oleh sekolah.

Sarana dan prasarana pembelajaran produktif yang tersedia di sekolah harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Karena dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana yang baik, maka akan memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran produktif yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengkaji lebih dalam lagi tentang “Pengelolaan Sarana dan

Prasarana Pembelajaran Produktif di SMK Negeri 3 Makassar.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan jenis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran produktif di SMK Negeri 3 Makassar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah: (1)peneliti melakukan wawancara secara terbuka dan mendalam dengan maksud agar memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran produktif,(2) peneliti melakukan pendekatan dengan cara bertindak sebagai pengamat saja (observasi non partisipan), pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat melakukan observasi dengan baik agar mampu menggali lebih dalam tentang pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran produktif di SMK Negeri 3 Makassar, (3) kegiatan dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, yaitu data yang didokumentasikan oleh pihak sekolah berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran produktif.Teknik analisis data yang digunakan adalah: (1)

mengumpulkan data (*data collection*), (2) reduksi data (*data reduction*), (3) penyajian data (*data display*), (4) *conclusion drawing/verivication*.

C. Hasil Penelitian

Proses pengelolaan terhadap sarana dan prasarana pembelajaran produktif yang dilakukan di SMK Negeri 3 Makassar, meliputi perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, dan penghapusan.

Perencanaan sarana dan prasarana pembelajaran produktif di SMK Negeri 3 Makassar diadakan setiap tahun, tepatnya setiap awal tahun ajaran baru sesuai dengan kebijakan yang ada di sekolah tersebut melalui kegiatan analisis kebutuhan, penentuan skala prioritas, penganggaran, dan penyusunan proposal pengadaan. Analisis kebutuhan didasarkan pada hasil evaluasi diri sekolah (EDS) dan usulan guru produktif. penentuan skala prioritas didasarkan pada kebutuhan yang mendesak yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Selanjutnya, kebutuhan yang telah ditetapkan dianggarkan dengan menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) dan dibuatkan proposal berdasarkan rencana.

Selanjutnya, untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran produktif di SMK Negeri 3 Makassar, maka dilakukan pencairan anggaran dan menentukan metode yang akan dilakukan dalam pengadaannya. Pencairan anggaran dapat dilakukan setelah kepala sekolah menyetujui proposal pengadaan yang diajukan. Sementara itu, sarana dan prasarana pembelajaran produktif di SMK Negeri 3 Makassar diperoleh dengan cara membeli langsung di toko atau di pabrik pembuatan peralatan yang dibutuhkan.

Proses inventarisasi sarana dan prasarana pembelajaran produktif di SMK Negeri 3 Makassar adalah melakukan pencatatan, pemberian kode dan pembuatan laporan terhadap seluruh sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembelajaran produktif secara rutin sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku di sekolah. Sarana dan prasarana pembelajaran produktif di SMK Negeri 3 Makassar dicatat ke dalam daftar peralatan oleh ketua program studi dan kartu inventarisasi ruangan (KIR) oleh wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Kartu inventarisasi ruangan (KIR) juga dijadikan sebagai laporan tahunan. Namun, sarana

pembelajaran produktif yang tertera dalam kartu inventarisasi ruangan tidak sesuai dengan sarana pembelajaran yang tersedia di ruang pembelajaran produktif. Selain itu, setiap sarana pembelajaran yang dimiliki oleh sekolah diberikan kode sesuai dengan aturan. Kode barang terdiri dari 10 (sepuluh) angka yang menunjukkan golongan, bidang, kelompok, sub kelompok, dan sub-sub kelompok. Namun, berdasarkan hasil observasi, sarana pembelajaran produktif yang terdapat pada ruang praktik belum diberikan kode barang sesuai dengan yang tertera dalam kartu inventarisasi ruangan.

Pemanfaatan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran masing-masing program studidan berdasarkan jadwal mata pelajaran masing-masing dan apabila jumlah peralatan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah peserta didik, maka guru menggunakan peralatan pembelajaran secara bergantian atau dengan membagi kelompok. Selain itu, ada buku panduan yang digunakan untuk pengoperasian peralatan praktik yang disertai arahan dari guru produktif.

Penghapusan sarana dan prasarana pembelajaran produktif adalah kegiatan menghapuskan sarana dan prasarana pembelajaran produktif dari daftar inventarisasi. Sarana dan prasarana

yang dapat dihapuskan adalah sarana dan prasarana yang memang tidak bisa dimanfaatkan lagi dalam pembelajaran produktif dengan mengidentifikasi sarana dan prasarana yang akan dihapus kemudian melaksanakan penghapusan. Ketua program studi yang peralatannya rusak bertugas mencatat peralatan yang rusak tersebut, sedangkan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana bertugas mengecek peralatan yang rusak. Namun, karena kartu inventarisasi ruangan (KIR) belum rampung, makanya peralatan yang rusak hanya bisa dicatat dan disimpan di gudang sekolah.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan sarana dan prasarana pembelajaran produktif di SMK Negeri 3 Makassar dilakukan melalui kegiatan analisis kebutuhan, penetapan skala prioritas, penganggaran, dan

penyusunan proposal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran produktif di SMK Negeri 3 Makassar didasarkan pada hasil evaluasi diri sekolah (EDS) serta usulan dari guru produktif. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Farikhah (2015) bahwa analisis kebutuhan adalah menyusun

semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Adanya kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran produktif di SMK Negeri 3 Makassar yang sangat banyak dan beraneka ragam, maka perlu ditentukan skala prioritas, dimana sarana dan prasarana yang akan ditindaklanjuti terlebih dahulu adalah sarana dan prasarana yang mendesak untuk digunakan dalam pembelajaran produktif. Hal ini sesuai dengan pendapat Farikhah (2015) bahwa penentuan skala prioritas adalah mengadakan seleksi terhadap kebutuhan sarana dan prasarana yang mendesak pengadaannya. Namun, karena anggaran yang tersedia untuk pengadaan sarana dan prasarana, maka kebutuhan setiap program studi yang berupa sarana dan prasarana pembelajaran produktif masih belum dapat terpenuhi secara menyeluruh, khususnya pada program studi teknik kendaraan ringan/otomotif dan teknik energi terbarukan. Selanjutnya penganggaran dilakukan dengan menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) dalam rapat program kerja sekolah. Selain itu, dalam penganggaran dilengkapi juga sumber dananya, yaitu dari dana bantuan

operasional sekolah (BOS) serta bantuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Farikhah (2015) bahwa penyediaan dana untuk pengadaan dibebankan kepada APBN/APBD, dan bantuan dari BP3 atau komite sekolah.

Kemudian, setelah dilakukan penganggaran, maka wakil kepala sekolah bidang sarana bersama ketua program studi menyusun proposal berdasarkan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS). Jadi, untuk rencana kegiatan yang sumber dananya berasal dari dana bantuan operasional sekolah (BOS), maka proposal dan ditujukan kepada kepala sekolah. Sedangkan untuk rencana kegiatan yang sumber dananya berasal dari bantuan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, maka proposal yang disusun berupa proposal permohonan bantuan dan ditujukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan oleh persetujuan kepala sekolah terlebih dahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran produktif di SMK Negeri 3 Makassar merupakan kegiatan menyediakan semua sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pembelajaran produktif yang berupa peralatan dan

ruang pembelajaran praktik sesuai dengan yang telah direncanakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Kompri (2014) bahwa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran yang telah dirumuskan dalam perencanaan.

Untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran produktif di SMK Negeri 3 Makassar, maka pihak sekolah yang bertanggungjawab terhadap pengadaan harus mencairkan anggaran dan menentukan metode pengadaannya. Pencairan anggaran berhubungan dengan penerimaan anggaran yang diperoleh dari sekolah untuk setiap program studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencairan dana dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan kepala sekolah. Pencairan anggaran ini disesuaikan dengan jumlah biaya yang tercantum dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS). Selanjutnya, pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran produktif di SMK Negeri 3 Makassar diperoleh dengan cara membeli dan

menerima bantuan. Sementara itu, menurut Fauzan (2016) bahwa pengadaan dapat dilakukan cara membeli, membuat bangunan baru, menerima hibah, menerima hak pakai/menukar, menyewa, melalui lelang/tender dengan rekanan. Pengadaan sarana pembelajaran produktif dengan cara membeli menggunakan dana bantuan operasional sekolah. Jadi, dana yang sudah dicairkan oleh bendahara digunakan untuk membeli peralatan yang dibutuhkan oleh masing-masing program studi. Hal ini sesuai dengan pendapat Arifin dan Barnawi (2012) bahwa pembelian merupakan pemenuhan kebutuhan sarana sekolah dengan menyerahkan sejumlah uang kepada penjual untuk memperoleh sarana pembelajaran dengan membeli langsung ke toko, pabrik dan memesan. Dalam hal ini, pembelian yang dilakukan di SMK Negeri 3 Makassar, yaitu dengan membeli langsung peralatan ke toko-toko terdekat saja. Tetapi, apabila peralatan yang dibutuhkan itu tidak ada di toko terdekat, maka harus dipesan langsung di pabriknya. Selain membeli dengan menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS), peralatan pembelajaran produktif di SMK Negeri 3 Makassar

juga diperoleh dari bantuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi sarana dan prasarana pembelajaran produktif di SMK Negeri 3 Makassar dilakukan dengan mencatat, memberikan kode dan menyusun laporan secara terperinci terhadap semua sarana dan prasarana pembelajaran produktif yang ada di sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Bafadal (2008) yang menyatakan bahwa inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu kegiatan dan menyusun semua sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah.

Kegiatan inventarisasi ini dilakukan agar semua sarana dan prasarana yang digunakan untuk pembelajaran produktif tercatat rapi dalam buku inventarisasi sehingga memudahkan dalam mengenali setiap peralatan yang ada pada masing-masing program studi, dan juga memudahkan dalam melakukan pengawasan. Hal ini sesuai dengan pendapat Farikhah (2015), bahwa tujuan kegiatan inventarisasi, yaitu: (1) untuk menciptakan tertib administrasi terhadap barang milik negara yang dimiliki sekolah, (2) memudahkan dalam pengendalian dan pengawasan

setiap barang, dan (3) menunjang proses pembelajaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan sarana dan prasarana pembelajaran produktif di SMK Negeri 3 Makassar dilakukan oleh ketua program studi, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, dan staf perlengkapan. Dalam hal ini, ketua program studi bertugas mencatat seluruh sarana atau peralatan pembelajaran produktif yang ada pada ruang praktik program studinya kemudian dilaporkan kepada wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana yang berupa daftar peralatan program studi. Selanjutnya, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana beserta staf perlengkapannya melakukan pengecekan terhadap hasil pencatatan ketua program studi dengan menyesuaikan antara daftar peralatan dengan peralatan yang ada di ruang praktik. Menurut Bafadal (2008), barang inventaris seharusnya dicatat di dalam buku penerimaan, buku induk inventaris dan buku inventaris. Namun, yang dilakukan di SMK Negeri 3 Makassar hanya pencatatan pada kartu inventarisasi ruang dan pada daftar peralatan program studi. Sementara itu, sarana dan prasarana yang tercatat dalam kartu inventarisasi ruang kurang sesuai

dengan peralatan yang tersedia di ruang pembelajaran produktif, baik itu jenis maupun jumlahnya.

Dalam kegiatan inventarisasi, pemberian kode pada peralatan pembelajaran produktif juga sangat diperlukan untuk memudahkan dalam pencatatan dan agar peralatan tersebut mudah dikenali, baik itu oleh peserta didik maupun guru produktif. Hal ini dilakukan karena peralatan yang digunakan untuk pembelajaran produktif itu beraneka ragam sehingga perlu diberikan kode sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh sekolah.

Menurut Bafadal (2008), kode barang merupakan sebuah tanda yang menunjukkan pemilikan barang yang ditulis pada barang yang sekiranya mudah dilihat dan dibaca. Kode barang inventaris biasanya berbentuk numerik. Untuk sekolah negeri, kode barang sudah ditentukan oleh pemerintah dan biasanya berjumlah 13 angka. Tetapi, pemberian kode yang dilakukan di SMK Negeri 3 Makassar dalam kartu inventarisasi ruang yang berjumlah 10 (sepuluh) angka yang terbagi menjadi 5 (lima) pengelompokan. Jadi, setiap kelompok kode terdiri dari 2 (dua) angka. Adapun kode yang dimaksud terdiri dari kode golongan, bidang, kelompok, sub kelompok, dan

sub-sub kelompok. Namun, dalam pemberian kode pada peralatan yang ada pada ruang praktik belum dilakukan secara menyeluruh. Pemberian kode tersebut hanya diberlakukan pada peralatan tertentu saja, seperti laptop, printer, dan mesin-mesin lainnya yang berukuran besar.

Hasil penelitian selanjutnya, menunjukkan bahwa SMK Negeri 3 Makassar membuat laporan inventarisasi sarana dan prasarana pembelajaran produktif sekali setahun, pada tahun ajaran baru. Laporan tersebut hanya berupa kartu inventarisasi ruang yang disusun oleh wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana berdasarkan daftar peralatan yang disusun oleh ketua program studi. Sedangkan menurut Departemen Pendidikan Nasional (2007) bahwa pelaporan inventarisasi terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan. Hal ini disebabkan karena daftar inventarisasi sarana dan prasarana pembelajaran produktif yang akan dilaporkan masih dalam tahap perampungan.

Pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran produktif di SMK Negeri 3 Makassar adalah menggunakan semua sarana dan prasarana untuk memperlancar proses pembelajaran produktif masing-

masing program studi. Hal ini sesuai dengan pendapat Arifin dan Barnawi (2012) bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk memperlancar proses pembelajaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran produktif di SMK Negeri 3 Makassar disesuaikan dengan jadwal penggunaan. Jadwal penggunaan yang dimaksud adalah jadwal mata pelajaran produktif yang telah dibuat di setiap awal semester. Penjadwalan ini dilakukan untuk menghindari bentrokan dengan kelas yang lainnya karena dalam setiap program studi memiliki beberapa kelas. Hal ini sesuai dengan pendapat Arifin dan Barnawi (2012) tujuan dari penyusunan jadwal penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran adalah untuk menghindari bentrokan antara kelompok satu dengan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman penggunaan sarana dan prasarana di SMK Negeri 3 Makassar berupa buku panduan pengoperasian alat praktik dan instruksi guru. Dalam hal ini, semua peralatan pembelajaran produktif digunakan berdasarkan pedoman pengoperasiannya masing-masing. Akan

tetapi, sebelum mengoperasikan peralatan tersebut, guru produktif yang bersangkutan memberikan penjelasan dan arahan kepada peserta didiknya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengoperasian peralatan. Dalam hal ini, guru produktif mengatur cara dalam memanfaatkan sarana dan prasarana dalam pembelajaran produktif sebagai berikut: 1) apabila jumlah peralatan mencukupi untuk digunakan oleh masing-masing peserta didik secara bersamaan, maka metode pembelajaran yang digunakan adalah secara individu. Akan tetapi, apabila jumlah peralatan pembelajaran produktif terbatas, maka guru menggunakan metode pembelajaran secara berkelompok agar semua peserta didik dapat menggunakan peralatan, meskipun secara bergantian. Hal ini sesuai dengan pendapat Farikhah (2015) yang menyatakan bahwa apabila sarana yang tersedia terbatas, maka sarana tersebut digunakan secara bergantian. 2) apabila sarana pembelajaran produktif dapat dibawa ke ruang kelas, maka pembelajaran produktif dilaksanakan di ruang kelas. Karena pembelajaran produktif di SMK Negeri 3 Makassar tidak selalu dilaksanakan di ruang praktik.

Penghapusan sarana dan prasarana pembelajaran produktif di SMK Negeri 3 Makassar adalah kegiatan yang

dilakukan untuk menghapuskan sarana dan prasarana pembelajaran produktif dalam daftar peralatan program studi maupun dari kartu inventarisasi ruangan.

Penghapusan tersebut dilakukan terhadap sarana dan prasarana yang sudah tidak layak pakai atau rusak. Hal ini sesuai dengan pendapat Mukhtar (2001) bahwa penghapusan sarana

pembelajaran adalah kegiatan menghapus daftar inventaris barang-barang yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai dengan peraturan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk dapat melakukan penghapusan terhadap sarana pembelajaran produktif yang sudah tidak layak pakai/rusak di SMK Negeri 3 Makassar, ketua program studi harus mengidentifikasi terlebih dahulu sarana yang rusak tersebut dengan mencatat nama/jenis dan jumlahnya secara lengkap. Hal ini sesuai dengan pendapat Bafadal (2008) bahwa semua sarana yang akan dihapus harus diinventarisir mulai dari jenis, jumlah dan tahun pembuatannya.

Selanjutnya, sarana pembelajaran produktif yang sudah masuk dalam daftar penghapusan langsung diajukan kepada kepala sekolah untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk ditindaklanjuti. Sebelum diajukan,

sarana pembelajaran tersebut dicek kembali oleh wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Selain daftar, masing-masing ketua program studi juga melampirkan foto sebagai bukti bahwa sarana pembelajaran yang diajukan adalah memang benar dalam keadaan rusak. Menurut Bafadal (2008) bahwa untuk melakukan penghapusan, kepala sekolah harus mengajukan usulan penghapusan dan membentuk panitia penghapusan dengan melampirkan daftar sarana pembelajaran yang akan dihapuskan ke kantor dinas pendidikan setempat. Akan tetapi, daftar inventarisasi ruangan di SMK Negeri 3 Makassar saat ini masih dalam tahap penyusunan. Jadi, semua sarana yang akan dihapuskan hanya bisa dicatat dan diverifikasi oleh wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, kemudian disimpan di dalam gudang sekolah untuk ditindaklanjuti lagi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara yang dilakukan untuk dapat menghapuskan sarana pembelajaran produktif yang rusak di SMK Negeri 3 Makassar adalah dengan memusnahkan, baik secara administrasi maupun secara fisik. Pemusnahan yang dimaksud adalah menghilangkan nama peralatan dalam daftar inventarisasi ruangan, sedangkan pemusnahan fisik adalah dengan

membakar peralatan yang rusak. Hal ini sesuai dengan pendapat Gunawan (2011) yang menyatakan bahwa salah satu cara penghapusan adalah dengan memusnahkan. Akan tetapi, karena daftar inventarisasi sarana dan prasarana pembelajaran produktif masih dalam tahap perampungan maka sarana pembelajaran produktif yang rusak saat ini belum bisa dimusnahkan.

E. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran produktif di SMK Negeri 3 Makassar, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut. Perencanaan sarana dan prasarana pembelajaran produktif yang dilakukan di SMK Negeri 3 Makassar adalah dengan melalui kegiatan analisis kebutuhan, penentuan skala prioritas, penganggaran, penyusunan proposal. Namun, tidak semua sarana dan

prasarana pembelajaran produktif yang dibutuhkan dapat dimasukkan dalam perencanaan. Hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana pembelajaran produktif yang akan direncanakan harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pengadaan sarana dan

prasarana pembelajaran produktif di SMK Negeri 3 Makassar dilakukan dengan mencairkan anggaran terlebih dahulu sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), kemudian melakukan pengadaan dengan cara membeli peralatan langsung ke toko ataupun ke pabrik dengan menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Selain itu, bantuan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran produktif juga bersumber dari pemerintah daerah. Prosedur inventarisasi sarana dan prasarana pembelajaran produktif di SMK Negeri 3 Makassar dilakukan dengan pencatatan, pemberian kode, serta pelaporan secara triwulan dan tahunan. Namun, karena adanya pergantian jabatan dan permasalahan-permasalahan internal yang dihadapi oleh SMK Negeri 3 Makassar, maka inventarisasi sarana dan prasarana pembelajaran produktif secara administrasi belum berjalan dengan baik. Sarana dan prasarana pembelajaran produktif di SMK Negeri 3 Makassar digunakan sesuai dengan jadwal mata pelajaran produktif dan untuk mencapai pembelajaran produktif yang efektif dan efisien, maka dalam pengoperasian peralatan menggunakan pedoman yang berupa buku panduan serta mengikuti instruksi dari guru produktif. Penghapusan sarana dan

prasarana pembelajaran produktif di SMK Negeri 3 Makassar dilakukan terhadap sarana dan prasarana pembelajaran produktif yang sudah tidak layak pakai/rusak dengan cara dilelang dan dimusnahkan/dibakar. Namun, karena daftar inventarisasi sarana dan prasarana pembelajaran produktif masih dalam tahap perampungan, maka sarana pembelajaran produktif yang rusak belum bisa dihapuskan.

Saran

Sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran produktif di SMK Negeri 3 Makassar, peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut. Pertama, hendaknya pengelola sarana dan prasarana lebih mengoptimalkan lagi perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran produktif sesuai dengan standar sarana dan prasarana SMK/MAK yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008, agar kebutuhan sarana dan prasarana untuk pembelajaran produktif dapat terpenuhi sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kedua, hendaknya pengelola sarana dan prasarana pembelajaran produktif lebih memperhatikan prosedur inventarisasi yang baik agar semua sarana dan prasarana

pembelajaran produktif yang ada di SMK Negeri 3 Makassar dapat terinventarisir dengan baik. Ketiga, hendaknya pengelola sarana dan prasarana segera menindaklanjuti semua peralatan pembelajaran yang rusak agar tidak menumpuk di gudang sekolah.

Daftar Pustaka

Arifin, M & Barnawi. 2012.

Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah. Jogjakarta: Arruz Media.

Bafadal, Ibrahim. 2004. *Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Farikhah, Siti. 2015. *Manajemen Lembaga Pendidikan*.

Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Fauzan. 2016. *Pengantar Sistem Administrasi – Teori dan Praktik*.

Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Gunawan, Ary H. 2011. *Administrasi Sekolah Administrasi Pendidikan Mikro*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kompri. 2014. *Manajemen Sekolah : Teori dan Praktik*.

Bandung: Alfabeta *Peraturan Menteri Pendidikan*

Nasional Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMK/MAK).

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Sayuti, S & Kurniawati, P. 2013 *Manajemen Sarana dan Prasarana di SMK N 1 Kasihan Bantul*.

Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, (online), Vol. 1, No. 1, (<http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp/article/view/2331>,

Diakses 02 April 2017).

Sugiyono, 2012. *Metode
Penelitian Pendidikan.*

Bandung: Alfabeta

Suryosubroto. 2009. *Proses
Belajar Mengajar Di
Sekolah.* Jakarta: PT. Rineka
Cipta.

*Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Salinan resmi
Pemerinta*